

# PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 13 TAHUN 2014

#### **TENTANG**

# URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## GUBERNUR GORONTALO.

## Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan yang menjadi
Kewenangan Panerintahan Daerah Provinsi Gorontalo;

## Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

D. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG BIDANG BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1. Sumber Day Air		<ol> <li>Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi.</li> <li>Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota</li> <li>Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai kabupaten/kota.</li> <li>Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota</li> <li>Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat provinsi dan/atau pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota</li> <li>Pembentukan komisi irigasi provinsi dan pengesahan pembentukan komisi irigasi antar kabupaten/kota.</li> </ol>
	2. Pembinaan	<ol> <li>Penetagan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.</li> <li>Penetagan dan pemberian rekomendasi teknis atas penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota.</li> <li>Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.</li> <li>Pemberian bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada kabupaten/kota</li> <li>Fasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya air</li> </ol>
	3. Pembangunan/ Pengelolaan	daya air.  6. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi lintas kabupaten/kota  7. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat provinsi dan kabupaten/kota  8. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat provinsi dan kabupaten/kota  1. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota  2. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota  3. Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala provinsi.  4. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat provinsi.  5. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah

1

	4. Pengawasan Dan Pengendalian	<ul> <li>irigasi lintas kabupaten/kota.</li> <li>6. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas kabupaten/kota.</li> <li>7. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.</li> <li>1. Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.</li> </ul>
2. Bina Marga	1. Pengaturan	<ol> <li>Pengaturan jalan provinsi:         <ol> <li>Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan provinsi berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan.</li> <li>Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan provinsi dengan memperhatikan keserasian antar wilayah provinsi.</li> <li>Penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder dan jalan kolektor yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten, antar ibukota kabupaten, jalan lokal, dan jalan lingkungan dalam sistem jaringan jalan primer</li> <li>Penetapan status jalan provinsi.</li> <li>Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan provinsi</li> </ol> </li> </ol>
	2. Pembinaan	<ol> <li>Pembinaan jalan provinsi:         <ul> <li>Pembinaan jalan provinsi:</li> <li>Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan provinsi dan aparatur penyelenggara jalan kabupaten/kota</li> <li>Pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan untuk jalan provinsi</li> <li>Pemberian fasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten/kota dalam penyelenggaraan jalan.</li> </ul> </li> <li>Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten/desa dan jalan kota.</li> </ol>
	3. Pembangunan Dan Pengusahaan	<ol> <li>Pembangunan jalan provinsi:         <ul> <li>Pembiayaan pembangunan jalan provinsi</li> <li>Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan provinsi</li> <li>Pengoperasian dan pemeliharaan jalan provinsi</li> </ul> </li> </ol>

.

		d. Pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen jalan provinsi.
	4. Pengawasan	Pengawasan jalan provinsi:     a. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan provinsi     b. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan provinsi
3. Perkotaan dan Perdesaan	1. Pengaturan	<ol> <li>Penetapan kebijakan dan strategi wilayah provinsi dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan (mengacu kebijakan nasional).</li> <li>Penetapan peraturan daerah provinsi mengenai pengembangan perkotaan dan perdesaan mengacu NSPK nasional.</li> </ol>
	2. Pembinaan	<ol> <li>Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan PS perkotaan dan pedesaan tingkat provinsi</li> <li>Fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan di wilayah provinsi</li> </ol>
	3. Pembangunan	<ol> <li>Fasilitasi penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah kota/kabupaten di wilayah.</li> <li>Fasilitasi kerjasama/ kemitraan antara pemerintah/daerah dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan di lingkungan provinsi.</li> <li>Penyelenggaraan pembangunan PS perkotaan dan perdesaan lintas kabupaten/kota di lingkungan wilayah provinsi</li> <li>Fasilitasi pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan dan</li> </ol>
	4. Pengawasan	perdesaan lintas kabupaten/kota.  1. Pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan di provinsi  2. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK
4. Air Minum	1. Pengaturan	<ol> <li>Penetapan peraturan daerah provinsi mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum lintas kabupaten/kota di wilayahnya</li> <li>Penetapan BUMD provinsi sebagai penyelenggara SPAM lintas kabupaten/kota</li> <li>Penetapan peraturan daerah NSPK pelayanan PS air minum berdasarkan SPM yang disusun pemerintah</li> <li>Memberikan izin penyelenggaraan untuk lintas kabupaten/kota</li> </ol>
	2. Pembinaan	1. Penyelesaian masalah dan permasalahan yang bersifat lintas kabupaten/kota 2. Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di lingkungan

....

6. Persampahan	1. Pengaturan	kabupaten/kota di wilayah provinsi mengacu pada kebijakan nasional  2. Penetapan lembaga tingkat provinsi penyelenggara pengelolaan persampahan lintakabupaten/kota di wilayah provinsi  3. Penetapan peraturan daerah NSPK pengelolaan persampahan mengacu kepada SPM yang ditetapkan oleh pemerintah  4. Memberikan izin penyelenggara pengelolaan persampahan lintas kabupaten/kota
	2. Pembinaan	<ol> <li>Fasilitasi penyelesaian masalah dan permasalahan antar kabupaten/kota</li> <li>Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama pemda/dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan lintas kabupaten/kota.</li> <li>Memberikan bantuan teknis dan pembinaan lintas kabupaten/kota.</li> </ol>
	3. Pembangunan	<ol> <li>Fasilitasi penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan PS persampahar secara nasional di wilayah provinsi</li> <li>Penyusunan rencana induk pengembangan PS persampahan lintas kabupaten/kota</li> </ol>
	4. Pengawasan	<ol> <li>Pengawasan dan pengendalian pengembangan persampahan di wilayah provinsi</li> <li>Evaluasi kinerja penyelenggaraan yang bersifat lintas kabupaten/kota.</li> <li>Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK</li> </ol>
'. Drainase	1. Pengaturan	<ol> <li>Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi provinsi berdasarkan kebijakan dan strategi nasional</li> <li>Penetapan peraturan daerah NSPK provinsi berdasarkan SPM yang ditetapkan oleh pemerintah di wilayah provinsi.</li> </ol>
	2. Pembinaan	<ol> <li>Bantuan teknis pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan</li> <li>Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematusan genangan di wilayah provinsi</li> </ol>
	3. Pembangunan	<ol> <li>Fasilitasi penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir lintas kabupaten/kota</li> <li>Fasilitasi penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase di wilayah provinsi</li> <li>Penyusunan rencana induk PS drainase skala regional/lintas daerah</li> </ol>

..-

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG		PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		7.	Pengawasan langsung terhadap penghunian dan pengelolaan rusun dan rusus penerima bantuan investasi ke kabupaten/kota
3. Pembinaan Perumahan Swadaya  1. Pembangunan Baru	1. Pembangunan Baru	2. 3. 4.	Perumusan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. Penyusunan RPJP dan RPJM provinsi tentang perumahan swadaya. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di provinsi. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatar kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya
		5.	pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatar kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
			Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan
		8.	Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah provinsi yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
	2. Pemugaran		Perumusan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.  Penyusunan RPJP dan RPJM provinsi perumahan swadaya.
		3	Pennsunan NSDM namban musus perumahan swadaya.
		4.	Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di provinsi. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
			Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya
		6.	Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG		PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		7. 8.	Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di tingkat provinsi. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah provinsi yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
	3. Perbaikan	1.	Perumusan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
		2. 3. 4.	Penyusunan RPJP dan RPJM provinsi perumahan swadaya. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di provinsi. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatar kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
		<ul><li>5.</li><li>6.</li><li>7.</li></ul>	Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatar kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di provinsi.
	4. Perluasan		Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah provinsi yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
		2.	Perumusan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. Penyusunan RPJP dan RPJM provinsi perumahan swadaya. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya tingkat provinsi.
		5.	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.  6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.  7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di provinsi.  8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah provinsi yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
	5. Pemeliharaan	<ol> <li>Perumusan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>Penyusunan RPJP dan RPJM provinsi perumahan swadaya.</li> <li>Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di provinsi.</li> <li>Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di provinsi.</li> <li>Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah provinsi yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</li> </ol>
	6. Pemanfaatan	<ol> <li>Perumusan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>Penyusunan RPJP dan RPJM provinsi perumahan swadaya.</li> <li>Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di provinsi.</li> <li>Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		Provinsi. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat provinsi.
		<ol> <li>Koordinasi dan sosialiasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan tingkat provinsi lintas kabupaten/kota.</li> <li>Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan lintas kabupaten/kota.</li> <li>Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan menatasa menatahan perumahan yang sesuai dengan penatasa menatahan perumahan</li> </ol>
		yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.  11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.  12. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentar pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
	5. Pemeliharaan	<ol> <li>Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan lintas kabupaten/kota</li> <li>Koordinasi penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat prov</li> </ol>
		<ol> <li>Peninjauan kembali (review) kesesuaian peraturan daerah kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</li> <li>Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di provinsi.</li> </ol>
		4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang- undangan bidang perumahan di provinsi.
		<ol> <li>Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan penangangan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi.</li> <li>Koordinasi fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi.</li> <li>Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat provinsi.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
6. Pembinaan Teknologi dan Industri	1. Pembangunan Baru	<ol> <li>Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentan pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan lintas kabupaten/kota</li> <li>Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendkung perumahan</li> <li>Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan</li> <li>Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</li> <li>Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</li> </ol>
	2. Pemugaran	<ol> <li>ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</li> <li>Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</li> <li>Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</li> <li>Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</li> <li>Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</li> </ol>
	3. Perbaikan	Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, sert PSU pendukung perumahan.  2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, sert PSU pendukung perumahan.  3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan Jahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
		4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
	4. Pemeliharaan	1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
		2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
		3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
		4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
	5. Pemanfaatan	1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
		2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
		3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
7. Pengembangan Pelaku Pembangunan	1. Pembangunan Baru	<ol> <li>Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan</li> </ol>
Perumahan, Peran Serta		2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
Masyarakat dan Sosial Budaya		3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
		<ol> <li>Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>Koordinasi fasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</li> <li>Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan perumahan, swasta dan masyarakat di tingkat provinsi.</li> </ol>
	2. Pemugaran	<ol> <li>Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> </ol>
		3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
		4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
		<ul> <li>5. Koordinasi fasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</li> <li>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah,</li> </ul>
	3. Perbaikan	swasta dan masyarakat di tingkat provinsi.  1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku
		2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
		3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.

...

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<ol> <li>Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kot tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>Koordinasi fasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</li> </ol>
		6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di tingkat provinsi.
	4. Perluasan	1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
		2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
		3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan
		4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kot tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumakan
		5. Koordinasi fasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/kota, badar usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.
		6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di tingkat provinsi.
	5. Pemeliharaan	1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
		2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
		3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
		4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
		5. Koordinasi fasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan
		6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di tingkat provinsi.
	6. Pemanfaatan	1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan
		2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		skala provinsi dan melaporkannya kepada pemerintah.  12. Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh skala provinsi untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan provinsi berdasarkan hasil verifikasi.
	7. Pembinaan Ketenagaker-jaan	<ol> <li>Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan skala provinsi.</li> <li>Pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan skala provinsi.</li> <li>Penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan skala provinsi.</li> <li>Penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan skala provinsi.</li> <li>Pelaksanaan penerapan SMK3 skala provinsi.</li> <li>Pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3 skala provinsi.</li> <li>Pengkajian dan perekayasaan bidang norma ketenagakerjaan, hygiene perusahaan, ergonomi, kesehatan dan keselamatan kerja yang bersifat strategis skala provinsi.</li> <li>Peayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan,</li> </ol>
		<ol> <li>Reselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis skala provinsi.</li> <li>Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan skala provinsi.</li> <li>Fasilitasi penyelenggaraan pembinaan pengawasan ketenagakerjaan skala provinsi.</li> <li>Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan skala provinsi.</li> <li>a. Pengusulan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan kepada pemerintah.</li> <li>b. Bekerjasama dengan pusat menyelenggarakan diklat teknis pengawasan</li> </ol>
		ketenagakerjaan.  12. Pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan skala provinsi kepada pemerintah.  13. Pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan skala provinsi kepada pemerintah.  14. Pengusulan kartu PPNS bidang ketenaga-kerjaan skala provinsi kepada pemerintah.
2. Ketransmigrasian	1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan	<ol> <li>Pelaksanaan kebijakan pusat dan perumusan kebijakan daerah serta pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala provinsi.</li> <li>Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan di</li> </ol>

. - -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		provinsi.  o. Pembinaan dan pengawasan breeding replacement melalui rearing cool (mempercepat penyediaan bibit) wilayah provinsi.  p. Pembinaan dan pengawasan penyaringan bibit di kawasan produksi peternakan wilayah provinsi.
	7. Pembiayaan	<ul> <li>1.a. Penerapan kebijakan dan pemantauan pengembangan investasi dan kebijakan permodalan melalui lembaga perbankan dan non perbankan wilayah provinsi.</li> <li>b. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program wilayah provinsi.</li> <li>c. Pembinaan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program wilayah provinsi.</li> </ul>
	8. Kesehatan Hewan (Keswan), Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan	<ul><li>1.a. Penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan wilayah provinsi.</li><li>b. Pembinaan dan pengawasan praktek hygiene-sanitasi produsen Produk Asal Hewan (PAH).</li></ul>
		c. Sertifikasi dan surveilans Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usaha PAH yang memenuhi syarat.
		d. Pengawasan peredaran lalu lintas produk hewan dari/ke wilayah provinsi dan lintas kabupaten/kota.
		<ul> <li>e. Pembinaan penerapan kesejahteraan hewan.</li> <li>2. Pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan wilayah provinsi.</li> <li>3.a. Penerapan dan pengawasan norma standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah provinsi.</li> </ul>
		4. Pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet wilayah provinsi.
		5. a. Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah provinsi. b. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah provinsi.
		c. Pencegahan penyakit hewan menular wilayah provinsi. d. Penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah tingkat provinsi.
		e. Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi di wilayah provinsi.  6. Penetapan dan identifikasi kebutuhan standar teknis minimal RPH/RPU,
		keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan

nakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan. wasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke ah provinsi dan lintas kabupaten/kota.
inaan dan pengawasan pelayanan keswan. inaan dan pengawasan penerapan standar teknis RPH dan RPU, rumah sakit n/unit pelayanan keswan terpadu, pet shop, poultry shop dan distributor newan. inaan dan pengawasan RPH dan RPU. inikasan dan pengawasan residu produk pangan asal hewan. inaan dan sertifikasi pelayanan medik veteriner (dokter hewan praktek, hewan dan rumah sakit hewan). binaan, pengawasan dan pengujian ternak dan bahan asal hewan untuk nekspor (ternak, daging, susu, hewan kesayangan, hewan liar, dll). inaan dan pengawasan penyidikan penyakit hewan. inaan penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan, parasit, bakteri, virus enyakit hewan lainnya. inaan pemberantasan dan pencegahan wabah penyakit hewan menular gis mewabah. inaan penutupan dan pembukaan kembali wilayah provinsi. inaan pembuatan peta situasi penyebaran penyakit hewan di provinsi. inaan pembuatan peta situasi penyebaran penyakit hewan di provinsi. inbinaan dan pengawasan dan pemantauan penyakit hewan zoonosis. inaan pelayanan dan pengamanan wilayah terpadu pada kejadian h/epidemik. inaan penerapan standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta ahteraan hewan wilayah provinsi inbinaan dan pelaporan pelayanan medik/paramedik veteriner di lembaga- nga pemerintahan dan unit-unit pelayanan medik/paramedik veteriner di terpovinsi binaan dan pengawasan penyidikan penyakit hewan. binaan penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan, parasit, bakteri

	THE PARTY OF THE P
official contributed as the property of the contributed of the contrib	<u> </u>
The state of the second of the	The state of the s
one de consideration de la constant	and the price and the administration of the first the first that the first the first that the first the fi
<u> 1997 - Anni Bernstein, de la </u>	ning di <del>n kangang pan</del> akan manakan kanggaran pangkan at
	the second secon
Arani, all an en en personalisment declaración de la contraction d	
California (Article) (Arti	Anthony for the Control of State History (State of State
- 12 day barrantanat general 11 day 1 day 9 minggan da taman da	ives ask som med i begrenden fill annakvættavelt i til til i bæretigt. 🔝 📗 🐯 💮
	in the formation of the control of t
The first of the second of the	kwalian Jang M <del>enggara</del> an palaman da Lin Linnan en <del>galin</del> ga tanggaran 💛 . Meng
ende de la companya del la companya de la companya del la companya de la companya	Laborate de la contraction del
	en de la finita de especial de la completa del la completa de la completa del la completa de la completa del la completa de
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	d. Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD: (1) Kebijakan (2) Pembinaan	<ol> <li>Pelaksanaan pedoman kedudukan protokoler dan keuangan DPRD provinsi.</li> <li>Fasilitasi penyusunan kedudukan protokoler dan keuangan DPRD kabupaten/kota</li> <li>Monitoring dan evaluasi kedudukan protokoler dan keuangan DPRD kabupaten/kota.</li> </ol>
	e. Kedudukan Keuangan KDH dan Wakil KDH:	
	(1) Kebijakan	1. Pelaksanaan pedoman kedudukan keuangan gubernur dan wakil gubernur.
	(2) Pembinaan	1. Fasilitasi kedudukan keuangan bupati dan wakil bupati/walikota uan wakil walikota.
	f. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) KDH:	
	(1) Kebijakan	1. Pelaksanaan pedoman LKPJ gubernur.
	(2) Pembinaan	Fasilitasi penyusunan LKPJ bupati/walikota.     Monitoring dan evaluasi LKPJ bupati/walikota.
	g. Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah : (1) Kebijakan (2) Pembinaan	Pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah
. Pemerintahan Umum	Fasilitasi Dekonsentrasi, Tugas     Pembantuan dan Kerjasama:	Gubernur melaksanakan dan melaporkan penyelenggaraan urusan pemerintahan

	A PROPERTY AND A SAME A SAME A SAME A SAME AND A SAME A	ervision market and the second		/			
	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	- <u>19-11 1991 - 200</u> 5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	-	~;~			₩####
	amaa waloo waxaa kaa aa		- <b> </b> • <b> </b> • •	- CB-42 \$ 2411 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2	erentalismontalismos al alle al compressiones el compress	- Loud Continue tipoterenterio en 1900 de 1900	,
::: 12227	a da nada nagaman naraa ya asuwasiwa	il Politorios is communicado delicario de la comencia				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	· firsteritaries Viento	viii ii	~1 [`	Tier Dienni ann			
maa.	Para de la composição de	dinima nengan www	8	1 % 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	. Alanda gasalingari erraen gasangae in anga Barana arangangan kabanan galabah angan	page on the contract of the second	
en en enn 🕬 .	AND THE COURT HAVE A CONTRACT OF THE COURT O	ra en. La calación de la calación de sente <del>de la calación de la calación de la calación de la calación de la calación</del>			and boundaring the court present	r ingala. Tiplication is the Company of the Company	1
:	unicatio <del>n</del> als of Beautiful yind unities		1 1		report from a resource and the second	i .	
		k temperaturggaran makee te eeste eeste este este este este e	11			nt 155 this course was types gaintmentale dar	
,	. jon skulik ikkusik ili teleferes	in increase de compara acidade desergia.			dignime pecalics, or min.	na franciska sini gran gaffinia lazenga	
	- 1		: 22.		. 1 <del></del>		
ann d'		igna in messer i Prise (1996) e Serbrigge og vigtualer i i i His ille eggett, i gjilli sig sig sig s ∮on ji om entre eksteuren je eggett het en in en sig sig sig ille eggett.	1 1	<u> </u>		and a market of the control of the	i
		······································		******* / /			
ATAK T		r restant intill intilla pulation				recommendation and the best of the bounding	i
الإممامية	was not be a series of the continue			: :	Auricania in in the process of	: [	Ī
· :- · <b>š</b> ;	rich calaba alabane Buribica escrib	inara		ariusus⊈sanassi Tasa∳. Pastastattaanassi tasa∳.	langer and a star was in the con-	<u> </u>	
7. F		r i nakonak upadan badangan <u>en Aroro</u> Landolomi ingunan padolomi da da	11		Library Control Conference Come	TO CONTROL OF THE CON	7 ·
	shaffaalaasso oo				: = = = <u>is_es</u>	: 0.775(55777 - 57777.577 - 577 - 577 - 577 - 577 - 577 - 577 - 577 - 577 - 577 - 577 - 577 - 577 - 577 - 577	
va: <u>.</u>	calina a di mangala ang ang kalanggang kanang da mangalang da di kal	(Killing in the common com	- : -		:	<u> </u>	
or — — or old or a care or call	nie intellected Persterentelistanie in	ra Parli (1917 - 1918) - Etab Militarya (ya mana 1914)		Markadalaran da da Wilar Barenena	@mm		
17 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	: Since Description of the Company of	: sama(lilla sama) or less bargs en en expense en e	1.)	ra va 🎉 : 💻 🖟	na ileelikasin garangantammimm	i. 18 George British (mentri sensi bermajan <u>mentra pendebengan benggan</u> an pendebengan benggan benggan benggan benggan	1 4
~~ · · - · · <del>- ·</del> · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Harry concern a result of the contract of the	, <del>+</del> :	: `~~A_ <b>~B</b> _~~~		i de la companya della companya della companya de la companya della companya dell	1 1
			1 2 7	이 아무 보지 비과를 보다 하고 하다고 하다고 하다.	000 300 <u> 15,</u> ////	il addro <u>g reliable, granis</u> eries	- 1 4

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
13. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi	The state of the s	Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja lima tahunan unit pemanta hutan produksi.
14. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		Penilaian dan pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) usaha pemanfaatan hutan produksi.
15. Penataan Batas Luar Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		<ol> <li>Pertimbangan teknis untuk pengesahan, koordinasi dan pengawasan pelaksar penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi li kabupaten/kota.</li> <li>Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan batas luar areal kerja</li> </ol>
16. Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)		pemanfaatan hutan produksi dalam kabupaten/kota  1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaaan dua puluh tahu (jangka panjang) unit KPHL.
17. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit KPHL		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jan menengah) unit KPHL.
18. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit KPHL		1. Pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
25. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit KPHK	,以此《法·李明·西·罗·西·······························	1. Pertimbangan teknis rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPLIK
Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru		1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang (dua pulu tahunan) untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisat alam dan taman buru skala provinsi.
27. Rencana Pengelolaan Ingka Menengah Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru		1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah untul cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan tamar buru skala provinsi.
28. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru		1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek untuk cagaralam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, dan taman buru skala provinsi.
29. Penataan Blok (Zonasi) Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru		1. —

. •

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
57. Pembinaan dan Pengendalian Bidang Kehutanan	1000 (100) (1000 (100) (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (100) (1000 (1000 (100) (1000 (1000 (100) (1000 (100) (1000 (100) (1000 (100) (1000 (100) (1000 (100) (1000 (100) (1000 (100) (1000 (100) (1000 (100) (1000 (100) (1000 (100) (1000 (100) (1000 (100) (100) (1000 (100) (1000 (100) (100) (1000 (100) (1000) (	1. Koordinasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi bidang kehutanan skala provinsi.
58. Pengawasan Bidang Kehutanan		1. Pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan oleh kabupaten/kota dan kinerja penyelenggara provinsi serta penyelenggaraan oleh kabupaten/kota di bidang kehutanan.

SUB BIDANG SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
en de la Participa de servicio.	16.Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-PK skala provinsi.
	17. Koordinasi, penyelenggaraan dan pelaporan pemberian rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala provinsi.
	18 Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP skala provinsi.
	18. Pengawasan dan penyidikan tindak pidana UUML.
3. Metrologi Legal	Pembinaan dan pengendalian pembangunan metrologi legal skala provinsi.
	2. Fasilitasi, koordinasi, penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian SDM metrologi skala provinsi.
	3.a. Koordinasi, rekomendasi penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal kabupaten/kota.
	b. Pelaksanaan verifikasi standar satuan ukuran milik provinsi dan kabupaten/kota.
	c. Penyelenggaraan interkomparasi skala provinsi.
	4. Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan tera dan tera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) di wilayah kabupaten/kota.
	5. Fasilitasi dan penyelenggaraan kerjasama metrologi legal skala provinsi.
	6. Fasilitasi dan penyelenggaraan penyuluhan dan pengamatan UTTP, BDKT dan SI.
	7. Koordinasi dan pembinaan pembuat UTTP, importir UTTP dan merekomendasikan pelaksanaan permohonan izin tipe dan izin tanda pabrik serta menerbitkan perpanjangan izin tanda pabrik dan izin reparatir UTTP.